



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ERNA SULISTYOWATI
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 135516

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 3.950.500.000**

1. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 450.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL  
SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/80 m2 di KAB / KOTA  
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 354.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANSA /MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 75.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 30.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2011, WARISAN Rp.  
3.000.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER/JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 600.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.322.558.088

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.227.058.088

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.227.058.088

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.